

TINDAKAN STRATEGIK MUHAMMADIYAH ATAS PARADOKSAL KEBIJAKAN NIPPONISASI DI HINDIA BELANDA

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto ¹, Shinta Wahyuni chairuddin ², Fadli Bastian ³,

Imam Chairudin ⁴, Hendy Apriansyah ⁵

Email : fasmadhydeddi@gmail.com ¹

Magister Ilmu Administrasi – FISIP- Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRACT

This paper discusses the role of Muhammadiyah in the Japanese population, with a focus on the Nipponization policy through the ritual obligation of the seikerei to worship the sun on the Dutch East Indies community, which was predominantly Muslim. This study discusses how the Japanese population used the myth of Joyoboyo's prediction for the Nipponization of the Dutch East Indies under the pretext of being an older brother from Japan. Japan came to replace the political conception of Divide et impera with an integrative strategy through the mobilization of Islam as the majority in the Indies. Japan's foreign policy was to homogenize culture in the Dutch East Indies through Nipponization in all aspects of people's lives, one of which was the obligation of the seikerei to worship the sun which intersects with the lower reaches of the Islamic faith. This study shows that Japan's massive Nipponization of Japanese culture was carried out by Japan to influence and have a cultural impact on the lives of the people of the Indies on the opinion of the popularity of the Japanese as the elder brothers of the Indies to liberate the Indies from the Dutch colonial as predicted by Joyoboyo. Especially in the Indies community, which is very thick with the myth of Joyoboyo's prediction that in the future people with dwarfs, slanted eyes, and yellow skin like corn will come to the archipelago. In this issue, we identify and explore the question of how the role of Muhammadiyah influenced Japan over its policy of Nipponization which was paradoxical between the obligations of the Seikerei and the belief in Islamic monotheism in the Indies. This paper uses a descriptive method with a qualitative approach to analyze Japan's foreign policy with the Nipponization of the Dutch East Indies. Through literature study, it can be described and analyzed Japanese foreign policy related to the Nipponization of the Dutch East Indies. The data collection technique used is library research whose sources come from journals, books, official government websites, and other secondary data. Based on the research results, colonialization is always colored by paradoxical policies on local communities and occupied territories, and there are always two opposing phenomena in change and continuity that go hand in hand. How Muhammadiyah plays a role in maintaining the creed of Islamic monotheism over colonialism in the Indies through Patton and Savicky's theoretical policy analysis.

Keywords: *Nipponization, Seikerei, Japanese Foreign Policy, Paradoxical Policy, Carlnaes*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas bagaimana peranan Muhammadiyah atas kependudukan Jepang, dengan fokus terhadap kebijakan Nipponisasi melalui kewajiban ritual seikerei menyembah matahari atas masyarakat Hindia Belanda yang mayoritas Islam. Penelitian ini membahas bagaimana kependudukan Jepang memanfaatkan mitos ramalan Joyoboyo untuk Nipponisasi Hindia Belanda dengan dalih sebagai saudara tua dari Jepang. Jepang datang menggantikan konsepsi politik Divide et impera dengan strategi integratif melalui mobilisasi Islam sebagai mayoritas di Hindia. Kebijakan luar negeri Jepang dengan menseragamkan kebudayaan di Hindia Belanda melalui Nipponisasi pada segala aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kewajiban seikerei menyembah matahari yang beririsan yang pada hilirnya berimpitan dengan keyakinan aqidah Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Nipponisasi kebudayaan Jepang secara masif dilakukan Jepang untuk mempengaruhi dan memberi dampak secara budaya pada kehidupan masyarakat Hindia atas opini untuk popularitas orang Jepang sebagai saudara tua Hindia untuk memerdekakan Hindia dari kolonial Belanda sebagaimana ramalan Joyoboyo. Terlebih pada masyarakat Hindia yang sangat kental dengan mitos ramalan Joyoboyo bahwa kelak akan datang orang-orang katai, bermata sipit, dan berkulit kuning seperti jagung datang ke Nusantara. Pada permasalahan ini kami mengidentifikasi dan mengeksplorasi pertanyaan mengenai bagaimana peranan Muhammadiyah mempengaruhi Jepang atas kebijakan Nipponisasinya yang paradoksal antara kewajiban Seikerei dengan keyakinan aqidah tauhid Islam di Hindia. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan luar negeri Jepang dengan Nipponisasi Hindia Belanda. Melalui studi kepustakaan dapat digambarkan dan dianalisis kebijakan luar negeri Jepang terkait dengan Nipponisasi Hindia Belanda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library research) yang sumbernya berasal dari jurnal, buku, website resmi pemerintah, dan data sekunder lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kolonisasi selalu diwarnai paradoksal kebijakan atas masyarakat lokal dan wilayah yang diduduki, dan selalu ada dua fenomena yang berlawanan dalam perubahan dan kontinuitas yang berjalan beriringan. Bagaimana Muhammadiyah berperan menjaga aqidah ketauhidan Islam atas kolonisasi di Hindia melalui Analisa kebijakan teori Patton dan Savicky.

Kata Kunci: Nipponisasi, Seikerei, Kebijakan Luar negeri Jepang, Kebijakan Paradoksal, Carlnaes

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pada masa kolonial, setelah Hindia dijajah Belanda, lalu datang Jepang menduduki Hindia. Dimana Jepang saat itu memenangkan perang Pasifik atas Barat dan sekutu sekutunya. Namun Jepang mengalami kerugian besar baik harta dan nyawa serdadu Jepang yang tewas, hal ini mengakibatkan Jepang kekurangan sumber

daya, hingga mitos ramalan Joyoboyo sebagai dejavu membentuk pencitraan Jepang secara mitologi, membuat persepsi masyarakat Hindia pada bangsa Jepang melalui ramalan Joyoboyo, bahwa Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih, dan kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai yang berkulit kuning seperti jagung dan bermata sipit. Namun

pemerintahan bangsa kulit kuning itu tidak lama, hanya seumur jagung seperti jenis warna kulitnya.

Hal ini menjadi bentuk mitos yang benar atau tidak mungkin secara kebetulan saja, namun tidak membuat manfaat atau kebaikan bagi masyarakat Hindia, apalagi membawa kebaikan bagi islam sebagai mayoritas di Hindia.

Keberadaan Jepang berada di Hindia Belanda akibat kekurangan sumber daya material dan sumber daya manusia. Jepang melihat bahwa di Hindia Belanda itu mayoritas islam, sumber daya islam ini bisa dimobilisasi untuk menjadi target Jepang dalam membantu Jepang menghadapi peperangan berikutnya di Asia dan Pasifik.

Tiga dimensi dalam pengambilan aksi kebijakan luar negeri menurut Carlsnaes. Ketiga dimensi ini memiliki hubungan sebab-akibat dan saling memengaruhi antara satu dan yang lain. Pertama adalah Intentional Dimension (choice dan preference). Pada dimensi ini, Carlsnaes (1992:254) mengatakan : “one can choose to deepen the analysis by providing a causal determination...” kita memahami kebijakan luar negeri yang diadopsi Jepang terhadap masyarakat Hindia dengan membuat deskripsi alasan atau penyebabnya untung keuntungan Jepang. Awal 1930 an perkembangan islam di Hindia Belanda membuat Jepang tertarik atas islam di Hindia. Jepang menganalisis bahwa islam bisa dimobilisasi untuk kepentingan mereka dalam menghadapi peperangan selanjutnya asia dan pasifik melawan barat dan aliansi sekutu. Jepang melakukan tindakan strategis pada awalan mereka ingin masuk ke Hindia Belanda dengan melakukan promosi kajian Islam dan menjalin relasi dengan para pemimpin Islam di Asia, hingga sampai tahun 1938 perhimpunan islam di Je-

pang dibentuk dan setahun kemudian Jepang membuat konferensi dan pameran Islam internasional di Tokyo.

Penyelenggaraan program internasional Pameran Islam di Tokyo dan Osaka pada tanggal 5-29 November 1939 berhasil dilakukan pemerintah Jepang, hal ini merupakan upaya Angkatan Darat Jepang untuk persiapan melakukan ekspansinya ke Hindia yang mayoritas penduduknya menganut islam. Hingga pada momen yang pas pada tahun 1942 Jepang berhasil ekspansi menduduki Hindia Belanda, menggantikan Belanda. Organisasi islam pada saat itu seperti Muhammadiyah, dilihat oleh pemerintah Jepang sebagai representasi yang berkaitan dengan sebuah konsep negara, kependudukan, masyarakat muslim, dan kalangan cendekiawan. Pada ekspansi Jepang ini ke Hindia, menurut Teori analisis kebijakan Patton dan Savicky bahwa proses kebijakan merupakan evaluasi alternatif kebijakan dari sisi teknis, ekonomi, dan politik yang dikaitkan dengan implementasinya.

Bagaimana Pemerintah Jepang dengan kebijakan Nipponisasi yang muatan politis sebagaimana teori analisis kebijakan Patton dan Savicky. Pada Nipponisasi ini ada salah satu ritual seikerei menyembah matahari pada kolektifitas kehidupan masyarakat Hindia yang mayoritas islam, hal ini menjadi paradoksal atas ketauhidan islam.

Kebijakan paradoksal Nipponisasi dengan kewajiban seikerei ini mendapat perhatian organisasi islam, Muhammadiyah secara politik kebijakan Nipponisasi dengan ritual Seikerei itu mengiris keyakinan tauhid islam sebagai mayoritas di Hindia Belanda yang dijadikan alat untuk mobilisasi.

Kebijakan Publik Nipponisasi melahirkan masalah publik dimana menjadi

masalah pada ketauhidan islam menjadi bagian dari titik awal menelaah pola kehidupan masyarakat Hindia. Pada masa colonial jepang ini, Muhammadiyah berperan memberikan pengaruh terhadap kebijakan Jepang atas nilai nilai keyakinan ketauhidan mayoritas islam yang bertentangan secara aqidah ketauhidan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana peranan Muhammadiyah terhadap Hindia atas kebijakan Nipponisasi, dalam hal ini islam sebagai mayoritas di Hindia.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi pada era kependudukan Jepang di Hindia, penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Muhammadiyah dalam menjaga aqidah islam mayoritas atas kebijakan Nipponisasi kependudukan Jepang.

Tinjauan Pustaka

Teori Kebijakan Luar Negeri

Menurut Holsti (1992:21) bahwa lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.

Ada empat hal yang menjadi tujuan utama dari Foreign Policy yaitu, 1) security atau keamanan; 2) otonomi; 3) kesejahteraan; 4) status atau prestige. Encyclopaedia Britannica (2020) ada tiga faktor yang sering mempengaruhi pengembangan kebijakan luar negeri yaitu: pertimbangan do-

mestik (domestic considerations); kebijakan atau perilaku negara lain (the policies or behaviour of other states); dan rencana untuk memajukan desain geopolitik tertentu (plans to advance specific geopolitical designs).

Sementara itu, Carlsnaes (1992:254) mengusulkan tiga dimensi yang saling berhubungan dan dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan terkait pengambilan kebijakan luar negeri yang ia sebut “a logically tripartite approach”.

Pertama adalah Intentional Dimension yang terdiri atas pilihan (choice) dan preferensi (preference). Kedua adalah Dispositional Dimension yang terdiri atas persepsi (perceptions) dan nilai (values). Ketiga adalah Structural Dimension yang terdiri atas kondisi obyektif (objective conditions) dan pengaturan kelembagaan (institutional setting).

Analisis Kebijakan Patton dan Savicky

Menurut Patton dan Savicky dalam Nugroho, (2012:359) bahwa analisis kebijakan publik dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan itu dibuat. Bentuk analisis dibagi menjadi dua yaitu prediktif dan preskriptif.

Analisis prediktif merujuk pada proyeksi kondisi masa mendatang sebagai hasil dari adopsi kebijakan. Sedangkan analisis preskriptif merujuk pada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang bersifat umum dan tidak memberikan fokus tertentu disebut advis, sementara rekomendasi yang menekan pembuat kebijakan agar memilih suatu kebijakan disebut advis persuasif.

Patton dan Savicky dalam Nugroho, (2012:360) mempromosikan enam langkah analisis kebijakan yang disebut a basic policy analysis process,

Proses Dasar Analisis Kebijakan menurut Savicky dalam Nugroho, (2012: 360) yaitu sebagai berikut;

1. Mendefinisikan, Verifikasi, dan Mendetail Permasalahan Kebijakan

Proses pokok dalam langkah mendefinisikan, verifikasi, dan mendetail permasalahan kebijakan adalah mengembangkan “pernyataan masalah” (*developing problem statement*) yang secara rinci terdapat langkah-langkah berikut Nugroho (2012: 361);

- a. *Think about the problem Delineate the boundaries of the problem*
- b. *Develop a fact base*
- c. *List goals and objectives*
- d. *Identify the policy envelope*
- e. *Display potential cost and benefits*
- f. *Review the problem statement*

Metode dasar yang dapat digunakan dalam mendefinisikan permasalahan antara lain back of the envelope calculations untuk memperkirakan ukuran permasalahan, quick decision analysis untuk mengidentifikasi atribut-atribut atau karakter-karakter pokok permasalahan, creation of valid operational definitions yaitu untuk memastikan bahwa kita menilai masalah yang hendak dinilai, political analysis untuk membuat kita tidak mengabaikan faktor-faktor yang tidak dapat dikuantifikasi, dan issue paper atau first-cut analysis yang mengidentifikasi masalah yang diperlukan.

Dalam metode quick decision analysis menurut Patton & Savicky dalam Nugroho, (2012: 362-363) yaitu akan tampak bahwa pengambil keputusan dihadapkan pada alternatif tanpa risiko dan alternatif berisiko.

Sedangkan metode analisis politik mengingatkan analisis kebijakan untuk melihat isu-isu politik sebagai bagian dari

integral dari proses kebijakan, mempelajari istilah-istilah yang lazim digunakan untuk mengkomunikasikan faktor-faktor politik tersebut, dan menggunakan metode yang konsisten dalam pelaporan, penyajian, dan analisis isu politik.

Agenda pokok adalah memastikan bahwa permasalahan dapat direduksi hingga ukuran yang dapat dikelola (*a man ageable size*).

2. Establishing evaluation criteria

Langkah kedua dalam analisis kebijakan publik menurut Savicky dalam Nugroho, (2012: 364-366), yaitu kriteria evaluasi. Dalam hal ini savicky memperkenalkan evaluasi dengan model yang bersifat ekonomis, yaitu:

- a. Free market model
- b. Kriteria biaya-biaya (*Costs*)
- c. Kriteria manfaat-manfaat (*Benefits*)
- d. Kriteria posisi (*Standing*)
- e. Kriteria eksternalitas
- f. Kriteria elastisitas
- g. Kriteria analisis marginal
- h. Kriteria keadilan

Pada akhirnya, kriteria evaluasi dapat dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang hendak dicapai, dan alternatif yang tersedia.

3. Mengidentifikasi Alternatif

Menurut Savicky dalam Nugroho, (2012:368) metode untuk mengidentifikasi alternatif dikelompokkan menjadi lima, yaitu :

1. *Reaserched analysis and experimentation* yang menggunakan teknik *passive collection and classification*.
2. *No-action analysis* yang menggunakan teknik pengembangan tipologi-tipologi (*development of typologies*).
3. *Quick surveys* yang menggunakan teknik analogi, metafora, dan sinektik-sebuah

teknik yang melihat masalah lama dengan cara pendekatan yang baru.

4. *Literature review* yang menggunakan teknik galang-gagas (*brain-storming*).

5. *Comparison of real world experience* yang menggunakan teknik perbandingan dengan suatu ideal.

4. Evaluasi Alternatif Kebijakan

Langkah ini khusus untuk kebijakan yang akan diambil.

Patton dan Savicky dalam (Nugroho, 2012:368) memperkenalkan dua (metode untuk menentukan alternatif kebijakan peramalan dan evaluasi. Untuk analisis peramalan terdiri dari ; ekstrapolasi, yaitu membuat proyeksi masa depan dengan menggunakan data masa kini; modeling teoritis, yaitu peramalan yang menggunakan pendekatan teori; peramalan intuitif, yaitu melakukan interview kepada para ahli atau pakar. Nugroho, (2012: 368).

Teknik evaluasi yang dapat digunakan adalah (a) teknik discounting yang menghitung future value dampak dari suatu kebijakan, (b) teknik three measures of efficiency, yaitu teknik efisiensi yang mengkombinasikan tiga ukuran efisiensi, (c) teknik analisis sensitivitas, yaitu proses yang digunakan dapat menemukan asumsi-asumsi yang bersifat kritical atau sensitif terhadap analisis Nugroho (2012: 369).

PEMBAHASAN

Hindia Belanda terkungkung oleh Forecasting ramalan kebijakan publik Joyoboyo Raja Kediri, mengenai kolonisasi bahwa kelak akan datang orang-orang katai, bermata sipit, dan berkulit kuning seperti jagung datang ke nusantara. Entah ini kebetulan saja, atau memang sudah garis hidup Hindia untuk menjadi kolonisasi

5. Menyajikan Alternatif Kebijakan

Patton dan Savicky menegaskan bahwa proses analisis kebijakan merupakan evaluasi alternatif kebijakan dan sisi teknis, ekonomis, dan politik, dikaitkan dengan implementasinya. Dalam penyajian alternatif kebijakan menurut Patton dan Savicky dalam Nugroho (2012 : 374) ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perbandingan sederhana, pendekatan matrix scorecard. Patton dan Savicky tidak memberikan rekomendasi, selain mengatakan bahwa bahaya terbesar dalam analisis kebijakan seringkali bukan pada rekomendasinya, namun pada pembobotan alternatif yang tidak akurat. Nugroho (2012 : 275).

6. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan yang diimplementasikan

Patton dan Savicky mengemukakan bahwa implementasi sama penting dengan kebijakan itu sendiri sehingga kegagalan implementasi dianggap sama dengan kegagalan kebijakan itu sendiri. Kemudian pada evaluasi kebijakan dilaksanakan dalam pola kontinum, dan evaluasi dalam pola kontinum dikelompokkan menjadi empat kegiatan yang berurutan, yaitu *ex ante*, *maintenance*, *monitoring*, dan *ex post* Nugroho (2012: 376)

dulu sebelum merubah diri menjadi republik merdeka, bernama Indonesia.

Ramalan dari seorang Raja Kediri, Joyoboyo ini patut diperhitungkan secara akademis sebagai keilmuan bagian dari analisis kebijakan, dalam meramal masa depan (*forecasting*), artinya Mbah buyut Joyoboyo ini sudah dapat meramal masa depan, notabene ilmu kebijakan publik pada saat

era kerajaan itu belum ada. Mungkin saja Joyoboyo meramal masa depan nusantara saat jaman kerajaan itu secara geografis wilayah nusantara yang lebih banyak laut menjadi negeri maritim.

Kedatangan Jepang ke Hindia sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Jepang, paska peperangan pasifik, dimana mereka mengalami kekurangan sumber daya, baik materiil, immaterial dan sumber daya manusia. Pemerintah Jepang membuat kebijakan luar negeri dengan melakukan ekspansi wilayah asia yang banyak mayoritas islam. Hal ini tidak lepas dari analisis kebijakan Pemerintah Jepang Ketika memformulasikan kebijakan luar negeri, bahwa sebuah wilayah mayoritas islam memiliki ghirah semangat berjuang hingga akhir hayat sebagai ladang amal berjuang dijalan Allah dalam membela negara sebagai nilai rukun iman. Jepang ingin ada sekutu sekutu yang bisa membantu Jepang dalam peperangan asia dan pasifik melawan barat dan aliansi sekutu.

Menurut Carlsnaes, ada tiga dimensi yang memiliki hubungan sebab-akibat dan saling mempengaruhi antara satu dan yang lain. Dimensi Pertama adalah Intentional Dimension (choice dan preference). Pada dimensi ini, Carlsnaes (1992:254) mengatakan, *one can choose to deepen" the analysis by providing a causal determination"* Bahwa kebijakan luar negeri yang diadopsi Jepang di Hindia, dalam ekspansinya ke Hindia memiliki sebab akibat yang dideskripsikan lewat Nipponisasi segala aspek kehidupan masyarakat Hindia dan wilayah Hindia, dengan cara memasukan kebudayaan Jepang masuk kedalam masyarakat Hindia untuk dapat diadopsi pemikiran Nipponisasi untuk mendapatkan jiwa Nipponisasi pada masyarakat Hindia. Seperti Kewajiban penggunaan bahasa Jepang dijadikan Lingua Franca Bahasa

komunikasi masyarakat Hindia, dan perilaku perilaku manusia Jepang diadopsi kedalam kehidupan masyarakat Hindia. Pada perjalanannya kebijakan Nipponisasi ini menjadi kebijakan paradoksal pada ritual seikerei menyembah matahari yang irisannya berhadapan dengan aqidah ketauhidan islam.

Kebijakan Nipponisasi mendapat respon Muhammadiyah sebagai bagian dari Hindia, menjadi bahan diskusi dalam memberikan respon kebijakan Nipponisasi. Diskusi tokoh tokoh Muhammadiyah seperti K.H. Mas Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo bersama tokoh nasional lainnya seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan kawan kawan. Dengan bersikap kooperatif pada pemerintah Jepang, tokoh tokoh nasional dan tokoh Muhammadiyah K.H Mas Mansur, dan Ki Bagus Hadikusumo untuk menjaga hubungan dengan baik secara intelektual bagaimana memberikan stimulus atas Nipponisasi. Pada kewajiban Seikerei Muhammadiyah berargumentasi pada Jepang keyakinan ummat islam itu adalah pada Allah Azza Wajalah, bukan menyembah matahari. Ki Bagus Hadikusumo memberikan pemahaman pada Jepang yang berbeda menolak kebijakan Pemerintah Jepang. Bukan sebab Kebijakan Nipponisasi, bahwa muslim secara aqidah ketauhidan itu iman pada Tuhan Yang Maha Esa, kalau harus menyembah matahari itu artinya sama saja mayoritas muslim di Hindia disuruh melakukan perbuatan syrik atas keyakinan yang mendua.

Bagi Muhammadiyah permasalahan saikerei ini menjadi masalah ummat islam terkait atas keyakinan aqidah islam hanya menyembah beriman pada Allah Azza Wajalah. Misi Nipponisasi Jepang dengan ketidakfahaman bahwa Seikerei adalah pengkaburan atas ketauhidan muslim di

Hindia, menjadi alat Jepang mengeksploitasi Hindia.

Diplomasi Muhammadiyah pada tokoh tokoh nasional bahwa ekstenalitas seikerei ini menganggap sudah terlalu jauh pada ketauhidan ummat muslim hanya menyembah Allah Azza Wajalah. Kewajiban saikerei menjurus pada perbuatan syirik yang dilarang Allah Azza Wajalah. Sedangkan islam tidak dapat menolerir pada hal hal yang diharamkan.

Analisis kebijakan Muhammadiyah terkait isu-isu politik dari Jepang sebagai bagian dari integral dari proses kebijakan yang akan dilakukan Muhammadiyah dalam peranannya. Muhammadiyah mempelajari istilah-istilah yang lazim digunakan pada Nipponisasi ini untuk dikomunikasikan pada tokoh tokoh nasional sebagai faktor-faktor politik luar negeri Jepang atas Hindia, dalam pelaporan, penyajian, dan analisis isu politik.

Melalui diplomasi sebagai agenda pokok, Muhammadiyah melakukan diplomasi secara intelektual dengan memastikan bahwa permasalahan dapat direduksi hingga ukuran yang dapat dikelola (a man ageable size). Memberikan pengertian secara komprehensif dan terukur berdasarkan kebijakan seikerei yang menjadi masalah ummat islam sebagai mayoritas dapat menimbulkan masalah internal masyarakat muslim sebagai mayoritas, hal ini dapat mengganggu kerja, target Jepang atas kekurangan sumber daya terkait untuk berperang melawan barat dan aliansinya. Melalui Kolonel Tsuda, pemerintah Jepang dapat memahami setelah dijelaskan bahwa kebijakan Nipponisasi terutama ritual seikerei ini dapat mengganggu hubungan baik jepang dengan islam sebagai mayoritas di Hindia Belanda.

Pilihan dan preferensi Jepang pada kebijakan luar negeri untuk menunjang

wibawa dan memastikan keamanan wilayah ekspansinya, secara tidak langsung dengan melarang pergerakan politik muslim, masyarakat Hindia, melakukan penutupan media Majalah resmi Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*, Jepang sempat menyetop penerbitan media ini antara Januari 1942 hingga Juni 1944, selanjutnya *Suara Muhammadiyah* Pada Juli 1944 (Radjab 1363) di-stop dan mulai aktif melalui disposisi Gunseikanbu (Administrasi Militer Pusat Jepang) pada tanggal 20 Desember 1943. Melalui persyaratan pengaturan dengan Disposisi birokrasi Jepang memonitor isi majalah *Suara Muhammadiyah*.

Pilihan dan preferensi Jepang ini pada pemaksaan kehendak atas pajak, kebutuhan hidup masyarakat Hindia dengan mematok pemaksaan penyerahan hasil panen perkebunan, dan pendapatan masyarakat lain lain, justru semakin menjadi masalah ummat muslim dan masyarakat Hindia.

Muhammadiyah melakukan bentuk lain relasi, (Patton dan Savicky bahwa proses analisis kebijakan merupakan evaluasi alternatif kebijakan dan sisi teknis, ekonomis, dan politik, dikaitkan dengan implementasinya). Pada tataran implementasi, Muhammadiyah mulai masuk kedalam internal Jepang, dengan memasukan tokoh Muhammadiyah pada program propaganda Jepang.

Dimensi kedua pada kebijakan luar negeri Jepang atas Hindia adalah Dispositional. Pada rasionalitas dimensi ini, Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), organisasi yang dikomandoi para putra terbaik Hindia yang bertujuan membantu Jepang saat darurat berperang melawan Sekutu. Pada dispositional ini nilai (values) dan persepsi (perceptions) dapat menginformasikan kausal perilaku disengaja pembuat keputusan, seperti pemberian

tanggung jawab pada Empat Serangkai, Soekarno, Moh Hatta, KH Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara, dengan membentuk mengkomandoi Pusat Tenaga Rakyat (Putera), berkolaborasi antara kalangan nasionalis dan Islam untuk memimpin pemuda pemuda Hindia dan Mayoritas muslim.

Empat Serangkai tokoh Putera ini, kolaborasi antara kalangan nasionalis seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki Hajar Dewantoro, lalu kalangan Islam, diwakili K.H. Mas Mansur yang juga merupakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari tahun 1937-1942.

Carlsnaes (1992:265) menjelaskan bahwa kemunculan faktor-faktor pada dimensi pertama dan kedua dielaborasi agar dimensi ketiga bisa difahami dimensi ketiga. Struktural yang terdiri atas kondisi objektif (objective conditions) dan pengaturan kelembagaan (institutional setting) dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan luar negeri.

Dalam konteks Jepang, pembentukan organisasi PUTERA dengan mengandalkan empat serangkai memimpin PUTERA sebagai underbow Jepang mempersiapkan diri berperang melawan barat dan aliansinya.

KESIMPULAN

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang atas ekspansi di Hindia merupakan bentuk kepanikan Jepang karena kehabisan sumber daya atas kebijakan luar negerinya berperang melawan barat dan aliansinya.

Kebijakan luar negeri Jepang dengan Nipponisasi adalah salah satu blunder, Ketika saat Jepang masuk kedalam negeri Hindia dengan memakai cara pendekatan kajian islam melalui seminar di Tokyo agar dekat batin jepang dengan islam sebagai

Selain itu, kondisi obyektif pada dimensi structural ini Jepang memiliki kekuatan untuk mengontrol Hindia, untuk mendapatkan sumber daya mempertahankan peperangan selama ini dilakukan melawan barat dengan aliansinya. Pada sisi lain dengan analisis kebijakan Patton dan Savicky yang tematis dengan politik, Muhammadiyah melakukan pemantauan dan evaluasi sejauh mana kebijakan Nipponisasi, ataupun kebijakan politis pada organisasi Putera ini dapat mendorong muslim sebagai mayoritas berkontribusi memiliki peran agar jangan kebijakan Jepang ini merusak aqidah ketauhidan muslim sebagai mayoritas di Hindia belanda, dan dapat menjadikan momentum yang datang untuk memerdekakan Hindia menjadi Republik Indonesia. Menurut Patton dan Savicky bahwa implementasi sama penting dengan kebijakan itu sendiri sehingga kegagalan implementasi dianggap sama dengan kegagalan kebijakan itu sendiri. Kemudian pada evaluasi kebijakan dilaksanakan dalam pola kontinum, dan evaluasi dalam pola continuum dikelompokkan menjadi empat kegiatan yang berurutan, yaitu *ex ante*, *maintenance*, *monitoring*, dan *ex post* Nughroho (2012: 376)

mayoritas di Hindia. Blunder Jepang yang fatal membuat aksi seikerei sebagai bagian dari Nipponisasi, hal ini justru dinilai bertentangan aqidah islam muslim di Hindia yang mendapat protes diplomatis oleh kalangan islam melalui Pimpinan Muhammadiyah, KH Mas Mansur dan Ki Hadi Kusumo.

Melalui analisis a logically tripartite approach, Carlsnaes, teridentifikasi bahwa Kebijakan Jepang dalam merespon kebutuhannya akan sumber daya tidak hanya

bersifat state-centric focus pada bagaimana membangun sumber daya untuk kekuatan perang melawan barat dan aliansi sebagai kedaulatan Nippon di dunia, akan tetapi Jepang ingin Asia termasuk Hindia menjadi kekuasaan Jepang secara kebudayaan, dan hal ini justru malah merugikan Jepang karena peranan Muhammadiyah membela aqidah Islam atas kemusyrikan yang didorong Jepang pada kebijakan Nipponisasi dengan melakukan seikerei menyembah matahari.

Melalui evaluasi dari implementasi kebijakan Nipponisasi, Muhammadiyah

melihat untuk mempengaruhi kebijakan Muhammadiyah harus masuk ke dalam sistem organisasi bentukan Jepang, seperti organisasi Putera untuk menunjukkan pengaruh politik Muhammadiyah melalui KH Mas Mansur yang tergabung dalam Putera pada pemerintah Jepang. Muhammadiyah menunjukkan pada umat mampu mengelola kolonialisasi jangan sampai menjadi arus perusakan aqidah Islam melalui Putera memperkuat kebijakan publik Putera atas kebijakan luar negeri Jepang di wilayah koloni.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cecilia, Menjivar., Marie, Ruiz, & Immanuel, Ness. 2019.

The Oxford Handbook of Migration Crises. New York: Oxford University Press.

Gleeson, Kathleen. 2016. Australia's "war on Terror" Discourse. New York: Routledge.

Holsti, K.J. 1992. International Politics : A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice Hall.

Kelly, Paul. 2009. The March of Patriots: The Struggle for Modern Australia. Melbourne: Melbourne University Press.

Jurnal

Anshori, Muhammad Fikry. (2020). Diplomasi Digital Sebagai Dampak Pandemi Global Covid-19: Studi Kasus Diplomasi Indonesia Di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Mandala. Vol 3. No 2. Januari-Juni 2020.

Connelly, Aaron L. (2014). Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi. Sydney: Lowy Institute.

Djelantik, Sukawarsini. (2020). Kerjasama Global Menangani The "Great Lockdown"; Pendekatan Diplomasi Multijalur. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Edisi Khusus April.

Hastangka dan Muhammad Farid. 2020. Kebijakan Politik Presiden Jokowi Terhadap Masalah Kewarganegaraan dalam Merespons Isu Blogal: Studi Kasus Covid-19. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8 No 1 April 2020, hal 1-12.

- Holsti, K.J. (1992). *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall International.
- Jessica Martha. 2020. Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Edisi Khusus April 2020.
- Purbantina, Adiasri Putri dan Renitha Dwi Hapsari. (2020) *Diplomasi Kesehatan di Era Pandemi Global: Analisa Bantuan Penanganan Covid-19 dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia*. *Global & Policy* Vol.8, No.1, Januari-Juni 2020
- Rosyidin, Mohamad. (2017). Foreign policy in changing global politics: Indonesia's foreign policy and the quest for major power status in the Asian Century. *South East Asia Research* 1–17.
- Situmorang, Mangandar. (2015). *Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK*.
- Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional**
 . Vol 11, No 1 (2015) Tri Andika, Muhammad. (2016). *An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi's Pro-People Diplomacy*. *Indonesian Perspective*, Vol. 1, No. 2 (Juli- Desember 2016): 1-13
- Weatherbee, Donald E. Weatherbee. (2016). *Understanding Jokowi's Foreign Policy*. Singapore: Yusof Ishak Institute.
- Azis, Avyanthi. 2014. Menelaah Konsep Human Security : Studi Kasus Penanganan Masalah Pengungsi Afganistan di Australia (1999-2002).” *Global* 7(1): 80-105
- Carlsnaes, Walter. 1992. “The Agency-Structure Problem in Foreign Policy Analysis.” *International Studies Quarterly* 36 (3): 245. <https://doi.org/10.2307/2600772>.
- Creek, Tristan G. 2014. “Starving for freedom: an exploration of Australian government policies, human rights obligations and righting the wrong for those seeking asylum.” *The International Journal of Human Rights* 18 (4–5): 479–507. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13642987.2014.901967>.
- Fox, Peter D. 2010. “International Asylum and Boat People: The Tampa Affair and Australia's „Pacific Solution.”” *Maryland Journal of International Law* 25 (1): 356–74

- Miftahur Rohman, 2018, Kebijakan pendidikan islam masa penjajahan jepang, STIT Bustanul ‘Ulum Lampung Tengah
- Agus miswanto, s.ag., ma m. zuhron arofi, m.pd.i, 2012, Sejarah islam dan kemuhammadiyah, pusat pembinaan dan pengembangan studi islam universitas muhammadiyah mage-lang .
- Sopanudin, 2016, Reaksi organisasi islam terhadap kebijakan politik Jepang di Indonesia (1942-1945)
- Faza Adhima, 05 November 2014, “Sejarah Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang” dalam <http://www.slideshare.net>.
- Adaby Darban, Ahmad, dan Mustafa Kemal Pasha, 2000, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam (dalam perspektif Historis dan Ideologis)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Adams, Cindy, 2014, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, terj. Syamsu Hadi, Jakarta: Yayasan Bung Karno
- Asany, Ali Munir., dkk,2010, Sinar Sang Surya di Bumi Lancang Kuning Sejarah dan Pembaharuan Muhammadiyah Riau. Pekanbaru: PWM Riau Majelis Diktilitbang dan LPI,2010, I Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Riyanto, Sigit. 2010. “Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional.” *Mimbar Hukum* 22 (3): 434–49. <https://doi.org/10.22146/jmh.271>.
- Website**
- Encyclopaedia Britannica. 2020. “Foreign Policy.” In <https://www.britannica.com/topic/evidence-based-policy>.
- Phillips, Janet. 2012. “The “Pacific Solution” revisited: A Statistical Guide to the Asylum Seeker Caseloads on Nauru and Manus Island.” Parliament of Australia, Department of Parliamentary..
- [https://www.aph.gov.au/About Parliament/Parliamentary Departments/Parliamentary Library/pubs/BN/2012-2013/Pacific-Solution](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/Pacific-Solution).
- Asylum Seeker Resource Center. 2013. “Temporary Protection Visas.” Asylum Seeker Resource Center, October: 1–2.
- Nurchayawan, Teddy, and Stefanus Reynold Andika. 2017. “PERMINTAAN MAAF AUSTRALIA DAN PRINSIP NON REFOULEMENT (STUDI KASUS PENCARI SUAKA SRI LANKA) Teddy Nurchayawan” 2 (1).
- Puteri C. M. A. S. 2011. ““KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA: PEMERINTAHAN JOHN HOWARD DARI PARTAI KOALISI LIBERAL (1996-2007) DAN PEMERINTAHAN KEVIN RUDD

DARI PARTAI BURUH (2007-2010.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hardi Alunaza, Ireng Maulana, and Adityo Darmawan Sudagung. 2018. “THE PACIFIC SOLUTION AS AUSTRALIA’S POLICY TOWARDS ASYLUM SEEKER AND IRREGULAR MARITIME ARRIVALS (IMAS) IN THE JOHN HOWARD ERA,” 61–75.

Septa, Albert Alfa. 2018. “Ancaman Keamanan Australia Pada Masa Pemerintahan John Howard : 2001-2007,” no. 2005: 2001–7.

Stats, Katrina. 2015. “We Will Decide: Refugee and Asylum Policy During the Howard Era Before Tampa.” *Australian Studies*